JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Analisis Implementasi Kinerja Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

Author:
Yohana Ewicha Br Harianja [1]
Ayu Kurnia Sari[2]
Renny Maisyarah[3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email:
yohanaewicha@gmail.com
ayukurniasari@dosen.pancabudi.ac.id
rennymaisyarah@dosen.pancabudi.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Pengelolaan anggaran pada organisasi pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Metode penelitian: Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif . Dimana metode deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.
Hasil penelitian: Realisasi anggaran menggambarkan tingkat penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran. Semakin tinggi realisasi anggaran, maka semakin besar anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.
Kesimpulan: Berdasarkan data DPA Tahun Anggaran 2024, DPMPTSP Kota Tebing Tinggi memiliki total anggaran belanja sebesar **Rp4.025.142.912**. Anggaran tersebut didominasi oleh belanja operasi, sehingga pelaksanaan kinerja anggaran sangat bergantung pada efektivitas penggunaan belanja operasional dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. Rencana penarikan dana telah disusun untuk seluruh bulan dalam tahun anggaran, sehingga secara perencanaan anggaran telah memiliki pola distribusi yang terstruktur.

Kata kunci: **Kinerja dan Anggaran**

1. Pendahuluan

Pengelolaan anggaran pada organisasi pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui anggaran, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya, serta mengukur sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perangkat daerah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kinerja anggaran menjadi isu penting karena realisasi anggaran sering kali masih lebih dominan dipahami sebagai tingkat serapan belanja. Padahal, kinerja anggaran seharusnya mencerminkan keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan capaian output dan outcome program. Serapan anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang baik apabila tidak diikuti dengan pencapaian target pelayanan. Sebaliknya, anggaran yang digunakan secara tepat, efektif, dan efisien dapat memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah. Dengan demikian, analisis implementasi kinerja anggaran diperlukan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, nonperizinan, dan fasilitasi penanaman modal. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi disebut sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama layanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu di wilayah Kota Tebing Tinggi, serta berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui digitalisasi layanan OSS RBA dan penyediaan fasilitas Mal Pelayanan Publik.

Peran tersebut menempatkan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kemudahan berusaha. Oleh karena itu, anggaran yang dikelola oleh DPMPTSP perlu diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi pegawai, penyediaan sarana prasarana, serta fasilitasi penanaman modal di daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, DPMPTSP Kota Tebing Tinggi memiliki total belanja sebesar **Rp4.025.142.912**. Anggaran

tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar **Rp3.962.734.212** dan belanja modal sebesar **Rp62.408.700**. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar **Rp2.142.321.328** dan belanja barang dan jasa sebesar **Rp1.820.412.884**, sedangkan belanja modal dialokasikan pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp62.408.700**.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa belanja DPMPTSP Kota Tebing Tinggi didominasi oleh belanja operasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas rutin, operasional pelayanan, administrasi perkantoran, serta kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Namun, dominasi belanja operasi perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah alokasi tersebut telah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, dan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mempublikasikan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 melalui PPID Kota Tebing Tinggi. Publikasi dokumen ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah, namun pada tingkat perangkat daerah tetap diperlukan analisis yang lebih spesifik untuk melihat bagaimana implementasi anggaran pada masing-masing dinas, termasuk DPMPTSP.

Permasalahan yang sering muncul dalam implementasi kinerja anggaran perangkat daerah adalah adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran, realisasi belanja, dan capaian kinerja. Dalam beberapa kondisi, anggaran dapat terealisasi secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila indikator kinerja belum dirumuskan secara tepat, kegiatan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pelayanan, pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan, atau evaluasi anggaran masih berfokus pada serapan belanja dibandingkan manfaat program.

Pada DPMPTSP, persoalan tersebut menjadi penting karena kinerja anggaran harus berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan iklim investasi. Anggaran yang digunakan seharusnya mampu menghasilkan perbaikan dalam proses pelayanan perizinan, ketepatan waktu layanan, kemudahan akses informasi, pemanfaatan layanan digital, serta peningkatan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Apabila pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya terhubung dengan indikator pelayanan tersebut, maka implementasi kinerja anggaran belum dapat dikatakan optimal.

Kinerja anggaran juga perlu dianalisis dari aspek efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana anggaran mampu mencapai target program dan kegiatan, sedangkan efisiensi menunjukkan kemampuan perangkat daerah menggunakan sumber daya secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil. Dalam konteks DPMPTSP Kota Tebing Tinggi, efektivitas dan efisiensi anggaran perlu dilihat dari kemampuan dinas dalam menggunakan anggaran untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki proses administrasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendukung kemudahan investasi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **Analisis Implementasi Kinerja Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi** penting dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana implementasi anggaran dilaksanakan, sejauh mana anggaran mendukung pencapaian kinerja, serta hambatan apa saja yang

memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPMPTSP Kota Tebing Tinggi dalam memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.

2. Studi Literatur

2.1 Grand Teori Penatagunaan Publik/ *Public Stewardship Theory*

Teori ini menekankan tanggung jawab fidusia pejabat pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Anggaran dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik.

Prinsip-prinsip utama teori penatalayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas yakni pejabat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi yakni informasi keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
3. Efisiensi yakni sumber daya publik harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan publik.
4. Efektivitas yakni program dan kegiatan publik harus efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif . Dimana metode deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti". Rusiadi (2013:14).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Sedangkan data sekunder berdasarkan dari pencatatan kegiatan transaksi yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk peneliti dalam mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
2. Teknik Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengobservasi penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dari penelitian.
3. Studi Perpustakaan merupakan salah satu studi yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini.
4. Wawancara merupakan salah satu cara peneliti dalam mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada para audiesnya.

1.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dekriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bersumber dari implementasi anggaran kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

4. Hasil Penelitian

4.1 Analisis Penelitian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, nonperizinan, serta fasilitasi penanaman modal di daerah. Keberadaan dinas ini penting karena pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel dapat mendorong iklim investasi, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah, DPMPTSP tidak hanya dituntut mampu memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga harus mampu melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis implementasi kinerja anggaran menjadi penting untuk melihat apakah anggaran yang digunakan telah mendukung pencapaian program, kegiatan, dan sasaran pelayanan publik.

Kinerja anggaran pada perangkat daerah dapat dilihat dari keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran, pencapaian output kegiatan, serta manfaat program bagi masyarakat. Dengan demikian, anggaran tidak hanya dipahami sebagai jumlah dana yang dibelanjakan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai target kinerja organisasi.

Secara umum, Kota Tebing Tinggi memiliki dokumen pengelolaan keuangan daerah yang dipublikasikan melalui kanal PPID, termasuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelaporan dan transparansi anggaran menjadi bagian dari tata kelola keuangan pemerintah daerah.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Implementasi Perencanaan Anggaran

Tabel 4.1
Anggaran DPMPTSP Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Anggaran 2024
1	Belanja Operasi	Rp3.962.734.212
1.1	Belanja Pegawai	Rp2.142.321.328
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.820.412.884
2	Belanja Modal	Rp62.408.700

No	Uraian Belanja	Anggaran 2024
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp62.408.700
	Jumlah Belanja	**Rp4.025.142.912**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi memiliki total belanja sebesar **Rp4.025.142.912**. Anggaran tersebut terdiri atas **Belanja Operasi sebesar Rp3.962.734.212** dan **Belanja Modal sebesar Rp62.408.700**. Belanja operasi terdiri dari **Belanja Pegawai sebesar Rp2.142.321.328** dan **Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.820.412.884**, sedangkan belanja modal dialokasikan pada **Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp62.408.700**. Berdasarkan komposisi tersebut, anggaran DPMPTSP Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 lebih banyak diarahkan pada **belanja operasi**, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja anggaran DPMPTSP lebih dominan digunakan untuk mendukung operasional pelayanan, pelaksanaan administrasi, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta penanaman modal. Sementara itu, belanja modal relatif kecil karena hanya dialokasikan untuk peralatan dan mesin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kinerja anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi diawali dari proses perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan program, prioritas pelayanan, target kinerja, serta kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadi dasar penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam praktiknya, perencanaan anggaran pada DPMPTSP diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem pelayanan, koordinasi penanaman modal, serta administrasi perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan seharusnya memiliki indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaannya dapat diukur.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih dapat menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain perubahan kebutuhan kegiatan, penyesuaian kebijakan anggaran, keterbatasan pagu anggaran, serta kebutuhan pelayanan yang berkembang lebih cepat dibandingkan rencana awal. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa kegiatan harus disesuaikan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, perencanaan anggaran yang baik harus didukung oleh data kebutuhan yang akurat, evaluasi tahun sebelumnya, koordinasi antarbidang, serta penetapan indikator kinerja yang realistis. Tanpa perencanaan yang kuat, implementasi anggaran dapat berjalan kurang optimal meskipun realisasi belanja terlihat tinggi.

4.2.2 Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi memperoleh alokasi belanja sebesar Rp4.025.142.912. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3.962.734.212 dan belanja modal sebesar Rp62.408.700. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran

DPMPTSP diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dinas, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan, nonperizinan, administrasi perkantoran, dan penunjang penanaman modal.

Rencana penarikan dana DPMPTSP Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun secara bulanan dengan total yang sama dengan jumlah belanja, yaitu Rp4.025.142.912. Penyusunan rencana penarikan dana secara bulanan menunjukkan adanya upaya pengendalian anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Namun, realisasi kinerja anggaran tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian target pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMPTSP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan mendukung iklim investasi daerah. Oleh karena itu, anggaran yang digunakan harus mampu menghasilkan output yang jelas, seperti peningkatan kualitas pelayanan, percepatan proses perizinan, kemudahan akses layanan, serta peningkatan koordinasi pelayanan terpadu. Apabila realisasi anggaran tinggi tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan, maka kinerja anggaran belum dapat dikatakan optimal. Sebaliknya, apabila realisasi anggaran sejalan dengan capaian output dan outcome pelayanan, maka implementasi kinerja anggaran dapat dinilai baik.

Dengan demikian, realisasi kinerja anggaran pada DPMPTSP Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu aspek keuangan dan aspek kinerja. Aspek keuangan dilihat dari tingkat realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, sedangkan aspek kinerja dilihat dari pencapaian target pelayanan, kualitas layanan, ketepatan waktu, dan manfaat program bagi masyarakat serta pelaku usaha

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap penting dalam melihat sejauh mana rencana anggaran dapat diwujudkan menjadi kegiatan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada DPMPTSP Kota Tebing Tinggi dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Pelaksanaan anggaran mencakup penggunaan anggaran untuk kebutuhan operasional kantor, pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas pegawai, koordinasi pelayanan terpadu, pengelolaan sarana prasarana, serta kegiatan pendukung lainnya. Dalam konteks pelayanan publik, anggaran yang digunakan seharusnya mampu mendukung peningkatan kecepatan layanan, ketepatan informasi, kepuasan masyarakat, dan efektivitas proses perizinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran berjalan cukup baik apabila kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal, output kegiatan tercapai, dan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Namun, implementasi anggaran belum dapat dikatakan optimal apabila masih terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penumpukan realisasi pada akhir tahun, atau kegiatan yang belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga harus dilihat dari kesesuaian antara anggaran, kegiatan, output, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Realisasi anggaran menggambarkan tingkat penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran. Semakin tinggi realisasi anggaran, maka semakin besar anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Namun, realisasi anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang baik apabila tidak disertai pencapaian output dan outcome yang sesuai.

Berdasarkan hasil analisis, realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Tebing Tinggi perlu dilihat melalui dua aspek, yaitu serapan anggaran dan capaian kinerja. Serapan anggaran menunjukkan berapa besar dana yang digunakan, sedangkan capaian kinerja menunjukkan apakah kegiatan yang dibiayai anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luh Tu Udayanti (2025) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020, analisis menunjukkan hasil efektif dan efisien. Untuk tahun 2021 dan 2022, analisis menunjukkan hasil efektif dan tidak efisien. Dan tahun 2023, analisis menunjukkan hasil kurang efektif dan tidak efisien. Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan anggaran sehingga dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data DPA Tahun Anggaran 2024, DPMPTSP Kota Tebing Tinggi memiliki total anggaran belanja sebesar **Rp4.025.142.912**. Anggaran tersebut didominasi oleh belanja operasi, sehingga pelaksanaan kinerja anggaran sangat bergantung pada efektivitas penggunaan belanja operasional dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. Rencana penarikan dana telah disusun untuk seluruh bulan dalam tahun anggaran, sehingga secara perencanaan anggaran telah memiliki pola distribusi yang terstruktur.

Namun, untuk menilai realisasi kinerja anggaran secara utuh, diperlukan data realisasi aktual dan capaian output dari LKjIP, LRA, atau laporan internal DPMPTSP. Oleh karena itu, analisis kinerja anggaran perlu dilengkapi dengan data realisasi belanja, capaian program, capaian indikator pelayanan, dan tingkat kepuasan masyarakat agar penilaian terhadap implementasi anggaran menjadi lebih objektif dan komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains.

Referensi

Arifah, S., Sari, A. K., & Nst, D. A. D. (2026). The Influence Of Regional Original Revenue On Capital Expenditure In Regencies/Cities Of North Sumatera. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, *5*(1), 303-308.

Faried, A. I., Sos, S., SP, M., & Sos, D. S. S. S. (2017). Keterhubungan pola pengambilan keputusan efektif, struktur dan budaya organisasi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *IRAWAN, SE, M. Si. dan Drs. ANWAR SANUSI, M. Si……..*, *8*

Fred R. David, 2018. Manajemen Strategi. Indeks Gramedia. Jakarta

Hadiyanto, D. W. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Selama Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Hasen, dan Mowen, 2016. Management Accounting. Salemba 4. Jakarta.

Hasana, N. A., & Hamdani, G. 2023. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7).

Ismail, Hanif, dan Darsono Prawironegoro, 2019 Sistem Pengendalian Manajemen, konsep dan Aplikasi. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 278-289.

Kaplan, R, S dan Norton, D, P, 2018. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Erlangga. Jakarta.

Made, A., & Ak, C. A. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Dppkad Kabupaten Situbondo).

Mulyadi, 2014. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yokyakarta.

Mulyadi, 2017. Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. Edisi kedua. Salemba . Jakarta.

Mahsun, 2018. Metode Penelitian. Duta Wacana University Press. Yogyakarta

Pardede, Pontas M., 2015. Manajemen Operasi dan Produksi: Teori, Model, dan Kebijakan. Edisi Pertama: Andi. Yogyakarta.

Pratama, D. (2023). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro).

Sari, A. K., & Saputra, H. (2023, December). The Influence of Supply Chain Management on Company Performance (Literature Study). In *International Conference on Sciences Development and Technology* (Vol. 3, No. 1, pp. 88-90).

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Sebayang, S. A., Daulay, M. T., Maisyarah, R., Shihab, M. W., & Gulo, A. J. (2025). Impact of energy transformation on economic productivity and environmental sustainability in toba-asahan, indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(1), 180-189.

Sihombing, A., Ranie, Z. A., & Kaputama, K. A. S. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Wilayah Kota Binjai.

Sedamaryanti, 2018. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung.

Udayanti, L. T., & Werastuti, D. N. S. (2025). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *16*(02), 249-265.

Watubun, J. S., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (studi di kantor DPPKAD kabupaten situbondo). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).